

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MEMBANGUN KESADARAN POLITIK PEREMPUAN GENERASI Z DI ERA DIGITAL (Studi Deskriptif Pada Komunitas Partisipasi Aktif Desa Comprong Tahun 2025)

Umi Nurjanah¹, Cahyono², Rd. Sugara Mochamad Haddad³

¹uminurjanah004@gmail.com, ²cahyono@unpas.ac.id, ³sugarauga@gmail.com

^{1,3} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

^{1,3} Universitas Mandiri

² Universitas Pasundan

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of increasing the political awareness of Generation Z women in the digital era, especially in Comprong Village, which still faces limited formal political education. The research problem formulation includes: (1) how is political education implemented for women in the Z community, (2) factors that influence political awareness, and (3) the role of technology and social media in increasing political participation. The purpose of this research is to analyze the implementation of political education, identify supporting and inhibiting factors, and examine the contribution of digital media to the political awareness of Generation Z women. The research uses the theory of implementation, political education, and Branson's (1998) concept of civic education. The approach used is qualitative with descriptive methods. Data were collected through interviews, observations, and documentation with female Gen Z respondents, village officials, and community leaders. The results show that the implementation of political education mostly takes place non-formally and informally through community forums and digital media. Factors that influence political awareness include education, family environment, community leaders, and access to social media. Digital media has proven to be a primary means of expanding young women's political participation. In conclusion, political education in Comprong Village is still partial, but has great potential to develop if managed in an integrated manner by the village government, educational institutions, communities and the public.

Keywords: *Political Awareness, Political Education, Generation Z Women, Digital Media*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan kesadaran politik perempuan generasi Z di era digital, khususnya di Desa Comprong, yang masih menghadapi keterbatasan pendidikan politik formal. Rumusan masalah penelitian meliputi: (1) bagaimana implementasi pendidikan politik bagi perempuan komunitas Z, (2) faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran politik, dan (3) peran teknologi serta media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk implementasi pendidikan politik, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menelaah kontribusi media digital terhadap kesadaran politik perempuan Gen Z. Penelitian menggunakan teori implementasi, pendidikan politik, serta konsep civic education Branson (1998). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan responden perempuan Gen Z, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan politik lebih banyak berlangsung secara nonformal dan informal melalui forum komunitas dan media digital. Faktor yang memengaruhi kesadaran politik mencakup pendidikan, lingkungan keluarga, tokoh masyarakat, serta akses media sosial. Media digital terbukti menjadi sarana utama dalam

memperluas partisipasi politik perempuan muda. Kesimpulannya, pendidikan politik di Desa Comprang masih parsial, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang jika dikelola secara terintegrasi oleh pemerintah desa, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Politik, Pendidikan Politik, Perempuan Generasi Z, Media Digital

I. PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi karena mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam menentukan arah kebijakan negara. Di Indonesia, partisipasi politik tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan hak pilih dalam pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam kegiatan kampanye, diskusi publik, maupun aksi sosial yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam kehidupan berbangsa (Prayugo & Prayitno, 2022). Tingkat partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan politik warga, sehingga semakin tinggi pemahaman politik, semakin tinggi pula kesadaran dan partisipasi politik masyarakat (Muttaqin & Al-Hamdi, 2023).

Dalam konteks demokrasi, kesadaran politik memegang peranan penting untuk menegaskan legitimasi pemerintahan. Warga negara yang sadar politik akan mengekspresikan dukungan mereka melalui proses pemilu maupun dalam pembentukan kebijakan publik. Kesadaran politik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, lingkungan sosial, peran keluarga, serta akses terhadap informasi digital (Achmad & Asmas, 2019). Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi instrumen yang sangat strategis untuk membekali warga negara dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap politik yang bertanggung jawab (Prayugo & Prayitno, 2022).

Perempuan, khususnya Generasi Z, merupakan kelompok yang memiliki potensi besar dalam memperkuat partisipasi politik di era modern. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi akibat norma sosial, keterbatasan pendidikan politik, dan

kurangnya representasi perempuan di ruang publik (Nurgiansah, 2021). Padahal, kebijakan afirmatif dan gerakan kesetaraan gender telah memberikan peluang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam politik. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan strategi pendidikan politik yang lebih kontekstual, khususnya bagi perempuan muda yang tumbuh dalam era digital.

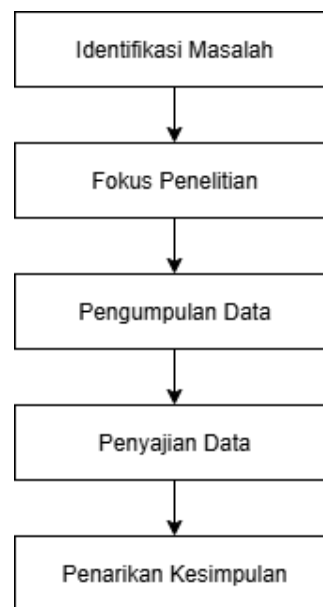
Era digital membuka ruang baru bagi pendidikan politik yang lebih inklusif. Teknologi informasi dan social media seperti Instagram, TikTok, maupun WhatsApp menjadi sarana utama bagi generasi muda untuk memperoleh informasi politik. Media digital memiliki potensi besar untuk memperluas akses dan meningkatkan kesadaran politik, meskipun pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan berupa hoaks, propaganda, dan rendahnya literasi politik (Ingsih et al., 2023). Fenomena ini terbukti di berbagai daerah, termasuk di Banda Aceh, di mana Generasi Z lebih banyak menggunakan media sosial untuk hiburan daripada untuk memperoleh informasi politik (Novita et al., 2024a).

Kondisi di Desa Comprang memberikan gambaran nyata mengenai persoalan ini. Sebagian besar perempuan Generasi Z di desa tersebut berada pada usia produktif dengan akses cukup luas terhadap teknologi digital. Namun, pendidikan politik yang mereka terima masih bersifat formal, terbatas, dan seringkali tidak menyentuh isu-isu aktual yang relevan. Minimnya tokoh perempuan inspiratif serta stereotip gender di masyarakat pedesaan semakin mempersempit ruang gerak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik (Nurgiansah, 2021).

Meski demikian, terdapat tanda positif berupa munculnya komunitas partisipasi aktif di Desa Comprang yang mulai memberikan pendidikan politik secara nonformal. Mereka memanfaatkan forum komunitas dan media sosial untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran politik perempuan muda. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan politik yang berbasis digital berpotensi membangun kesadaran politik yang lebih kritis, inklusif, dan kontekstual (Ingsih et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan politik bagi perempuan Generasi Z, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran politik mereka, serta menelaah kontribusi media digital dalam memperluas partisipasi politik di era demokrasi modern.

II. METODE

Metode penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan pada fokus penelitian untuk memperjelas ruang lingkup kajian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu masuk ke tahap penyajian data yang disusun secara deskriptif agar mudah dianalisis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara induktif berdasarkan hasil temuan lapangan. Metode penelitian dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu penelitian yang berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna daripada angka (Creswell & J. David Creswell, 2018). Pendekatan ini sesuai untuk menggali implementasi pendidikan politik karena mampu menjelaskan proses, pengalaman, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran politik perempuan Generasi Z di Desa Comprang. Penggunaan metode kualitatif juga memungkinkan peneliti melakukan interpretasi kontekstual terhadap data, sehingga hasil penelitian lebih komprehensif (Sugiyono, 2020).

1. Implementasi Pendidikan Politik

a. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah proses memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada warga negara agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik secara sadar, kritis, dan bertanggung jawab (Harahap et al., 2022). Pendidikan politik berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat melalui pembelajaran formal maupun nonformal (Novita et al., 2024b).

b. Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan utama pendidikan politik adalah membentuk warga negara yang memiliki kesadaran politik tinggi, partisipatif, serta

mampu menyalurkan hak dan kewajiban politiknya dengan baik. Selain itu, pendidikan politik juga bertujuan memperkuat legitimasi demokrasi, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dan membekali masyarakat dengan kemampuan kritis dalam menyikapi isu politik (Sarofah, 2023).

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Politik

Kesadaran politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan peluang seseorang memiliki kesadaran politik yang baik (Sjoraida & Nugraha, 2023). Lingkungan sosial dan keluarga membentuk orientasi politik individu, sementara media massa dan media sosial berperan besar dalam pembentukan opini publik. Kondisi sosial-ekonomi menentukan akses informasi dan partisipasi politik, sedangkan tokoh masyarakat serta elite politik berfungsi sebagai teladan sekaligus penggerak partisipasi (Sarofah, 2023).

2. Konsep PPKn Sebagai Wahana Pendidikan Politik Masyarakat

a. Pengertian PPKn

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang bertujuan membekali peserta didik dengan nilai, pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai warga negara yang beriman, berakhlak mulia, demokratis, serta bertanggung jawab. PPKn berfungsi menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan partisipasi politik sejak dini (Pasaribu, 2017).

b. Visi dan Misi Mata Pelajaran PPKn

Visi PPKn adalah membentuk warga negara yang cerdas, partisipatif, dan berakhlak Pancasila. Untuk mewujudkannya, PPKn memiliki misi menanamkan nilai dan moral Pancasila, mengembangkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme, serta membentuk keterampilan berpikir kritis, reflektif, dan partisipatif dalam kehidupan demokratis.

c. Konten-Konten Mata Pelajaran PPKn (Kurikulum Merdeka)

Dalam Kurikulum Merdeka, konten utama PPKn mencakup Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip persatuan dalam keberagaman, serta NKRI sebagai bentuk negara dan kewajiban bela negara. Selain itu, PPKn juga menekankan pentingnya literasi digital, pemahaman hak asasi manusia, serta partisipasi politik dalam kehidupan demokrasi (Widiyanto & Istiqomah, 2023).

d. Hubungan PPKn dengan Politik (Khususnya Pemilu)

PPKn memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan politik karena menjadi sarana awal bagi peserta didik untuk memahami konsep demokrasi, partisipasi warga negara, serta mekanisme pemilu. Melalui PPKn, siswa diperkenalkan pada hak memilih, pentingnya legitimasi pemilu, serta peran warga negara dalam menjaga demokrasi (Afiani et al., 2024).

Dengan demikian, PPKn tidak hanya membentuk karakter kebangsaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di masa depan (Mufidah & Syarofi, 2024).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Comprong

Comprong adalah desa di Kecamatan Comprong, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang berjarak sekitar 30 km di utara Kota Subang dan $\pm 2,5$ km dari pusat kecamatan. Desa ini menjadi jalur penghubung kawasan Pantura dengan wilayah selatan Subang, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani. Secara administratif, Comprong terdiri atas tiga dusun, yaitu: Comprong, Sukaseneng, dan Karangsari dengan total 11 RW dan 32 RT. Profil Desa Comprong dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Desa Comprang

Batas wilayahnya meliputi Desa Bojonegara di barat, Desa Kalensari di timur, Desa Bojong Tengah di utara, dan Desa Mekarjaya di selatan. Daerah ini dikenal sebagai sentra persawahan produktif dengan sistem irigasi teknis yang memungkinkan panen padi hingga tiga kali setahun dan pemanfaatan lahan untuk berkebun pada musim kemarau.

2. Temuan Hasil Penelitian

a. Bentuk Implementasi Pendidikan Politik

Pendidikan politik bagi perempuan Gen Z di Desa Comprang dilakukan secara variatif melalui media sosial, sosialisasi, dan diskusi kelompok yang membahas peran serta suara perempuan dalam demokrasi. Di

sekolah dan perguruan tinggi, isu kesetaraan gender dimasukkan ke dalam PKn, pelatihan kepemimpinan, dan debat politik untuk melahirkan pemimpin muda kritis. Pelatihan literasi digital dan simulasi demokrasi lokal juga memberi pengalaman langsung pengambilan keputusan serta membuat Gen Z lebih bijak bermedia. Tokoh lokal turut menjadi agen edukasi melalui ceramah, mentoring, dan konten digital untuk meningkatkan kepercayaan diri perempuan agar aktif berpolitik.

b. Kesadaran Politik Perempuan Gen Z

Penelitian ini mengungkap bahwa pendidikan politik di ranah sosial, digital, dan kelembagaan meningkatkan kesadaran politik perempuan Gen Z di Desa Comprang, terutama dalam pemahaman hak dan kewajiban politik, sikap kritis terhadap kebijakan publik, serta pemanfaatan media digital untuk informasi politik. Responden menunjukkan minat pada isu spesifik seperti kesetaraan gender, perubahan iklim, dan kesejahteraan perempuan, serta aktif berdiskusi di grup keluarga, komunitas, dan forum kampus. Mereka juga selektif dalam menerima informasi, siap berpartisipasi dalam pemilu, serta terlibat di organisasi sosial-politik meski belum banyak yang mencalonkan diri sebagai kandidat politik. Tingkat Kesadaran Politik Kategorisasi dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tingkat Kesadaran Politik Kategorisasi

Tingkat Kesadaran	Persentase	Karakteristik
Tinggi	± 35%	Aktif berpendapat, mengikuti isu, dan terlibat kegiatan politik secara langsung
Sedang	± 50%	Tahu hak politik, peduli isu publik, tapi belum terlibat aktif
Rendah	± 15%	Apatis, menganggap politik tidak relevan, jarang mengakses berita politik

Pendidikan politik di era digital telah meningkatkan kesadaran politik perempuan Gen Z di Desa Comprang, terlihat dari bertambahnya pengetahuan, kepedulian isu publik, sikap kritis, dan keterlibatan sosial-politik. Meski begitu, kesadaran ini masih

menghadapi tantangan budaya, struktural, dan gender sehingga perlu penguatan melalui kebijakan inklusif dan pendidikan politik berkelanjutan.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan implementasi pendidikan politik perempuan Gen Z di Desa Comprang didukung oleh akses teknologi dan literasi digital yang tinggi, lingkungan keluarga dan sosial yang mendukung, serta keterlibatan aktif lembaga lokal, tokoh perempuan, dan kurikulum pendidikan yang memuat nilai

politik. Selain itu, kampanye digital pemerintah/LSM dan meningkatnya kesadaran gender mendorong perempuan muda lebih percaya diri, kritis, dan aktif berpartisipasi dalam ruang publik dan politik. Faktor Pendukung dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Faktor Pendukung

Aspek	Faktor Pendukung Utama
Teknologi	Akses internet, smartphone, dan konten edukatif di media sosial
Keluarga dan Sosial	Lingkungan keluarga terbuka, teman sebaya, komunitas
Lembaga Lokal	Program pelatihan, diskusi publik, simulasi demokrasi
Pendidikan Formal	Kurikulum PKn, kegiatan OSIS/BEM, pelatihan kewarganegaraan
Role Model	Tokoh perempuan lokal yang inspiratif
Pemerintah dan LSM	Kampanye digital dan program inklusif untuk perempuan muda
Kesadaran Gender	Dukungan dari gerakan kesetaraan dan narasi pemberdayaan perempuan

Sedangkan Faktor penghambat pendidikan politik bagi perempuan Gen Z di Desa Comprang mencakup rendahnya literasi politik dan digital, minimnya akses program pendidikan politik formal maupun non-formal, budaya patriarkis yang masih kuat, keterbatasan peran tokoh perempuan lokal, serta kendala ekonomi dan waktu. Dukungan pemerintah desa dan lembaga terkait juga masih terbatas, sehingga dibutuhkan pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk memperkuat kesadaran politik perempuan di era digital.

3. Penyajian Data Hasil Observasi

Hasil observasi menunjukkan bahwa pendidikan politik perempuan Gen Z di Desa Comprang berlangsung melalui kombinasi kegiatan formal komunitas, interaksi sosial sehari-hari, dan pemanfaatan media digital. Perempuan mulai aktif berdiskusi, mengakses, serta membagikan informasi politik, yang berdampak pada meningkatnya kesadaran dan partisipasi mereka. Meski begitu, masih terdapat

tantangan berupa keterbatasan pengetahuan, rasa kurang percaya diri, dan pengaruh budaya patriarkis yang menghambat keterlibatan penuh.

4. Penyajian Data Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan perangkat desa, pemuda, perempuan Gen Z, dan tokoh masyarakat, pendidikan politik di Desa Comprang masih bersifat informal, berlangsung melalui forum pemuda, musyawarah desa, karang taruna, media sosial, dan kegiatan sekolah, meski sinergi antar pihak belum kuat. Kesadaran politik perempuan Gen Z dipengaruhi akses teknologi digital, pendidikan, dukungan keluarga, pengalaman berorganisasi, budaya patriarki, dan kehadiran figur teladan. Media sosial berperan penting sebagai sumber informasi dan motivasi politik, sekaligus ruang partisipasi digital, namun rendahnya literasi digital membuat sebagian perempuan rentan terhadap hoaks sehingga diperlukan penguatan literasi politik dan digital agar lebih bijak memanfaatkannya.

5. Gambaran Lokasi Penelitian

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pendidikan politik perempuan Gen Z di Desa Comprang berlangsung melalui pertemuan rutin, musyawarah desa, seminar, diskusi publik, pelatihan kepemimpinan, hingga konten media sosial. Arsip dan notulen rapat memperlihatkan perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga menyampaikan usulan dan kritik. Foto kegiatan menampilkan keterlibatan mereka dengan dukungan perangkat digital. Screenshot media sosial berisi poster, video, dan kutipan inspiratif tentang pentingnya

partisipasi perempuan dalam politik. Laporan kegiatan memperlihatkan kerja sama perempuan Gen Z dengan perangkat desa dan lembaga pendidikan dalam agenda musyawarah desa, pengawasan program pemerintah, dan kegiatan sosial. Dokumentasi juga mencatat aksi nyata mereka di lapangan seperti kampanye lingkungan dan gotong royong, mencerminkan kesadaran politik yang tumbuh melalui peran aktif di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan politik terjadi bukan hanya di ruang formal, tetapi juga digital dan sosial.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan politik bagi perempuan Generasi Z di Desa Comprang lebih banyak berlangsung secara nonformal melalui forum komunitas dan pemanfaatan media digital. Faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran politik mencakup pendidikan, lingkungan keluarga, tokoh masyarakat, serta akses terhadap media sosial yang semakin terbuka di era digital. Temuan lain menegaskan bahwa media digital berperan signifikan sebagai sarana utama penyebaran informasi politik, meskipun masih dihadapkan pada tantangan rendahnya literasi politik dan maraknya hoaks. Secara keseluruhan, pendidikan politik bagi perempuan Generasi Z di era digital masih bersifat parsial, namun memiliki potensi besar untuk dikembangkan apabila dikelola secara terintegrasi oleh pemerintah desa, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat, sehingga mampu memperkuat partisipasi politik yang kritis, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, I. A., & Asmas, M. A. (2019). Pola Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar Sebagai Program Pendidikan Non Formal (Studi Kasus di SKB Bulukumba): (Studi Kasus di SKB

Bulukumba). *Jurnal AKRAB*, 10(2), 2–11.

<https://doi.org/https://doi.org/10.51495/jurnalakrab.v10i2.291>

Afhiani, S. N., Elyta, & Apriyani, E. (2024). Strategi Pendidikan Politik Pemilih Pemula (Generasi Z) Menjelang Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Kubu Raya. *Sosio Edukasi: Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 7(2), 3–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.29408/sosedu.v7i2.24031>

Creswell, J. W., & J. David Creswell. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. SAGE Publications.

Harahap, M. I., Izzah, N., & Ridwan, M. (2022). Determinan Komunitas Z Menerapkan Gaya Hidup Halal Di Kota Padangsidempuan. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 23–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3761>

Ingsih, K., Riyanto, F., Perdana, T. A., & Astuti, S. D. (2023). Model Digital Kurikulum untuk Program MBKM Menuju Kesiapan Kerja Generasi Z Menghadapi Era Industri 4.0. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 29(2), 180–196.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.35315/jbe.v29i2.9113>
- Mufidah, A., & Syarofi, A. (2024). Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *The Republic : Journal of Constitutional Law*, 2(1), 35–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.868>
- Muttaqin, M. I., & Al-Hamdi, R. (2023). Pendidikan Politik: Upaya Komisi Pemilihan Umum Sleman dalam Mewujudkan Kesadaran Politik Waria. *PERSPEKTIF*, 12(4), 1389–1399. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.9947>
- Novita, D. D., Sianipar, K., Sikumbang, A. T., & Nazwa, W. S. (2024a). Pola Komunikasi Politik Terhadap Generasi Z Pada Pemilu 2024. *Mandub Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 106–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1359>
- Novita, D. D., Sianipar, K., Sikumbang, A. T., & Nazwa, W. S. (2024b). Pola Komunikasi Politik Terhadap Komunitas Z Pada Pemilu 2024. *Mandub Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 106–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1359>
- Nurgiansah, T. H. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.14994>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 5(1), 51–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442. <https://doi.org/https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.138>
- Sarofah, R. (2023). Pengaruh Pendidikan Politik Gen Z Dan Millenial Terhadap Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas. *JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN*, 9(1), 70–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.7219>
- Sjoraida, D. F., & Nugraha, A. R. (2023). Upaya Peningkatan Pengetahuan Politik Melalui Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Komunitas Z. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(2), 104–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i2.20>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jp.v32i1.2826>